

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Yang Miskin Justru Tidak Dapat Bansos

JAKARTA-Sejumlah pihak menilai pembagian bantuan sosial (Bansos) DKI Jakarta tidak tepat sasaran. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku pihaknya menerima laporan sejumlah warga miskin justru tidak mendapatkan bansos.

"Saya mendapat banyak laporan warga yang disebut miskin dan rentan miskin, justru tidak dapat," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020). Prasetyo menyebut, bansos justru diterima oleh warga di Kelapa Gading. Menurutnya, penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak disalah gunakan.

"Tapi saya baca di berita justru warga di Kelapa Gading dapat itu paket bantuan. Ini piye?" kata Prasetyo. Menurutnya, seluruh penerima subsidi ini harus tepat sasaran. Tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakannya di tengah kesulitan akibat pandemi yang terjadi.

Menurutnya, Pemprov DKI memperbaiki data penerima bansos. Perbaikan ini disebut perlu dilakukan dari tingkat rukun tetangga (RT), lurah hingga dilaporkan di tingkat provinsi. "Saya minta Pemprov DKI memperbaiki data penerima. Karena itu perbaiki lah, data mulai dari RT RW kemudian masing-masing lurah melaporkan ke tingkat Kota kemudian provinsi. Karena data ini juga akan digunakan pemerintah pusat," cetusnya.

Jumlah Bertambah

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera memperbaiki data penerima bantuan sosial yang terdampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab hal itu akan berdampak pada penambahan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang terdampak akibat virus Corona (Covid-19).

"Karena akan ada banyak lagi warga yang kena PHK, dirumahkan tidak digaji, dibayar gaji cuma separo, pelaku usaha kecil omzetnya menurun drastis, UMKM bangkrut. Itu kan (datanya) harus diperbaiki di tahap berikutnya," kata Mujiono di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Anies sebelumnya meneken Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang penerimaan bantuan sosial selama PSBB. Keputusan itu ditandatangani Anies pada 16 April 2020.

Dalam keputusan itu, Anies menetapkan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang akan menerima bantuan sosial selama PSBB sebanyak 1.194.633 kepala keluarga (KK).

Mujiono menilai, keputusan gubernur tersebut telat dikeluarkan Anies. Sebab, proses penyaluran bantuan sosial sudah dilaksanakan sejak 9 April 2020, atau sehari sebelum PSBB dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua, Mujiono mendesak Anies dan jajarannya harus bekerja lebih cepat dan efektif dalam menangani data penerima bansos.

Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut, terkait program penyaluran bansos DKI masih amburadul. Peralihan kesalahan data, proses penyaluran juga dinilai masih bermasalah. "Distribusi bansos minggu pertama yang belum merata dan akurasi data yang sudah menerima membuat pertanyaan besar soal kesungguhan Pemprov DKI dalam membantu masyarakat," kata Gilbert di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Salah satu contoh ketidakakuratan data penerima bantuan sosial Covid-19 ini terjadi ketika seorang anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak masuk dalam daftar penerima bansos tersebut.

Gilbert menilai, kekacauan data dan penyaluran bansos ini karena sejak awal Anies lebih banyak berpolemik dengan pemerintah pusat. Padahal waktu tersebut dapat digunakan Anies untuk mempersiapkan pelaksanaan PSBB.

Gilbert pun berharap, pada pemberlakuan PSBB tahap kedua, Pemprov bisa memperbaiki hal tersebut. "Diharapkan ada kerendahan hati untuk mendengarkan kritik, dan mau memperbaiki sistem distribusi," ujarnya.

Akui Salah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga mengatakan, pendataan penerima bantuan sosial

dari Pemerintah DKI Jakarta untuk warga terdampak pandemi virus Corona tidak mungkin sempurna.

Menurut Anies, kekeliruan data sangat mungkin terjadi di Indonesia. Meski begitu ia berjanji, ketika ada kekeliruan data maka akan segera dikoreksi. "Ketika ada kekeliruan kami koreksi, koreksi, dan koreksi, dan ini bagian dari kami meningkatkan kualitas data," tutur Anies kemarin.

Seorang anggota DPRD DKI Jakarta masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) akibat kekeliruan data. Anggota dewan ini adalah Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak. Johnny membenarkan data yang menyebutkan ia telah menjadi salah satu penerima bantuan.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies. Kesalahan tersebut terdapat dalam periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies menyebutkan bahwa konsep yang digunakan oleh Pemprov DKI belum diperbarui karena menggunakan data yang lama.

Kemudian belum dilakukannya pengecekan lapangan karena kondisi yang tidak memungkinkan. "Daripada dibalik cek dulu ke lapangan semua kumpulan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta pendistribusian bansos akan diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga. (dni)